

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 210 TAHUN 2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN
DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2018**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa ada usulan perubahan Pengelolaan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Insitut Teknologi Bandung, untuk menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan penyesuaian Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa terakreditasi;

- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pendidikan Non Reguler Direktorat Pendidikan Non Reguler Institut Teknologi Bandung Nomor 198/IT1.B04/DL/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Perubahan Pengelolaan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa ITB, perlu menetapkan perubahan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan Dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018.

- Mengingat
- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2018.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2018, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ LKPP; dan
5. Direktur Pendidikan Non Reguler Institut Teknologi Bandung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN STATUS
AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN
PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI LEMBAGA
PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2018

NOMOR : 210 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 OKTOBER 2022

DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TERAKREDITASI

INSTANSI	LOKASI	KATEGORI AKREDITASI	MASA BERLAKU
Direktorat Pendidikan Non Reguler - Institut Teknologi Bandung	Bandung	Terakreditasi A	5 April 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI